

PROBLEM ETIK DALAM HUKUM POSITIF

Oleh :

Ari Purwadi

(e-mail: aripurwadi.fhuwks@yahoo.co.id)

Dosen DPK Kopertis Wilayah VII Di UWKS

Jl. Dukuh Kupang XXXVI/ 54 Surabaya 60225 Telp./Fax : (031) 5674186.

Abstract

Ethics refer to desirable conduct. Determining what is desirable conduct in a given situation depends on what values one follows. The value recommend to guide in positive law. Jurisprudence is the study of values concerning law and legal systems. Schools of jurisprudence present different values for judging whether positive law is appropriate ethical conduct.

Keywords : *ethics, conduct, value, positive law, jurisprudence.*

Tulisan ini didahului dengan 3 cerita sebagaimana yang ditulis oleh Fisher dan Phillips (Bruce D. Fisher dan Michael J. Phillips, 2001: 3-4):

Wilson Ford dipecat oleh majikannya, karena digagalkan suatu tes detektor kebohongan. Dia mengatakan telah menyimpan uang tunai milik majikannya, malam hari, pada Bank NCNB. Tetapi bank tidak menemukan deposito pada hari esoknya, maka majikannya menyatakan bahwa dia berbohong tentang menyimpan uang di bank tersebut, dengan cara suatu tes detektor kebohongan.

Perluah suatu kekurangan pekerja dengan tes detektor kebohongan dapat layak dipercaya? Eric, tidak dibayar uang kontrak untuk membangun kolam renang untuk taman milik Dorothy Powell, meskipun kolam tersebut bagus. Dorothy menyatakan bahwa Eric tidak mempunyai

lisensi pemborong (kontraktor) kolam renang, dan berdasarkan hukum menyatakan bahwa kontrakmu yang demikian itu adalah cacat. Eric berpikir ini adalah tidak dilarang dan orang sedang mempercayakan terlalu banyak pada hukum untuk menentukan apa yang benar (berhak) atau salah. Dorothy datang dan menawarkan pekerjaan, yang kemudian dilaksanakan oleh Eric dengan penawaran yang rendah.

Hukum lisensi tidak menyatakan Dorothy tidak boleh membayar kepada Eric. Menurut Eric, yaitu lakukan hal yang secara moral benar dengan membayar kepada Eric.

Ralph, pada waktu menjadi mahasiswa telah menulis surat ke anggota Konggres yang menuntut hukum pengendalian polusi yang kuat dan hukum perlindungan pekerja, mencakup suatu upah minimum pemerintah federal lebih tinggi dan hak pekerja untuk tawar-